

RANCANGBANGUN STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI KELAPA SAWIT (AGROSAWIT)

Muhammad Said Didu

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

ABSTRACT

The characteristics of palm oil agroindustry are specifically regional-based, involving many people, and related to many development sectors. Therefore, the development strategy is different between one region and the others but, the national strategy is required.

The research objective was to assess the hierarchy priority of factor, actor, goal, and policy instrument and to form strategy of AGROSAWIT development in Indonesia. The research methodology used was Analytical Hierarchy Process (AHP).

The result showed that in the short term, the success factors of AGROSAWIT system are farm subsystem and palm oil processing subsystem. Therefore, the priority of institution design, policy, and strategy has to be focused on the both subsystems. The strategy of AGROSAWIT development is to achieve the required capital, improve market condition, adjustment of government role and policy. The priority of goal is to increase the farmer and labor income. The priority of policy instrument is adjustment of standard price system of fresh fruit bunch (FFB), labor wages, and improvement of tax and retribution system.

Keyword : policy, strategy, system approach, institution, and development.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Kebijakan di bidang pemerintahan didefinisikan sebagai rangkaian aksi yang dipilih, mencakup tujuan yang ingin dicapai dan metode untuk mencapai tujuan tersebut (Killick, 1989). Penetapan kebijakan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumberdaya dan menciptakan kesetaraan individu atau kelompok (Needham, 1982). Strategi merupakan rencana cermat yang disusun berdasarkan kebijakan untuk mencapai tujuan, termasuk didalamnya kebijakan yang akan digunakan.

Karakteristik umum sistem AGROSAWIT, yaitu diusahakan oleh masyarakat dan dunia usaha dengan berbagai tingkatan, produknya dipasarkan secara luas (nasional, regional, dan global), memanfaatkan sumberdaya (terutama) lahan yang besar, serta menjadi sumber perputaran dana yang cukup besar. Dengan karakteristik demikian maka terdapat berbagai *stakeholder* dan kebijakan yang terkait.

Ditjen Perkebunan (1999) menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit terdapat di 16 Propinsi dan 52 Kabupaten dengan luasan sekitar 2.95 juta ha. Luasan tersebut diperkirakan akan

meningkat karena masih tersedia potensi lahan sekitar 24,96 juta ha lahan hutan konversi yang dapat digunakan untuk perkebunan (Parnin, 1999).

Permintaan dunia akan produk sawit terus meningkat dan daya saing terhadap produk substitusi utama yaitu kedele cukup tinggi. Perkembangan konsumsi minyak nabati dunia, termasuk minyak kelapa sawit meningkat sangat pesat, yaitu pada kurun waktu 1993 - 1997 konsumsi rata-rata 90,5 juta ton dimana pangsa minyak sawit 17 persen dan akan meningkat menjadi 104,3 juta ton pada kurun waktu 1998 - 2001 dengan pangsa minyak sawit meningkat menjadi 19,2 persen (Parnin dan Buana, 1999). Pada tahun 2008 - 2012 diperkirakan pangsa pasar minyak sawit di pasar dunia sebesar 22,5 persen dari total kebutuhan minyak nabati yang mencapai 132,234 juta ton (Tondok, 1998).

Berbagai lembaga di pusat dan di daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan berkaitan dengan sistem AGROSAWIT. Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 peran lembaga dan kebijakan daerah akan semakin meningkat sebagai dampak dari proses desentralisasi.

Devisa yang dihasilkan dari hasil ekspor CPO cukup besar. Hasil penjualan CPO dari produksi tahun 1999 sekitar 6 juta ton dengan asumsi harga \$ 300/ton akan menyebabkan perputaran dana sekitar \$ 1,8 milyar (Said Didu, 2000a).

Berdasarkan pola status **pengusahaan** dan pola pengembangan, maka bentuk kelembagaan **usaha** AGROSAWIT terdiri dari perusahaan negara, perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, koperasi, kemitraan, dan petani **lepas/bebas**. Sejak tahun 1999 pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan konsep pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan (KIM-Bun). Dalam pelaksanaannya, dikembangkan melalui lima pola pengembangan, yaitu : (1) Koperasi Usaha Perkebunan, (2) Patungan Koperasi dan Investor, (3) Patungan Investor dan Koperasi, (4) *Built, Operate and Transfer (BOT)*, dan (5) pola **"BTN"**, yaitu pola yang dikembangkan seperti pengembangan perumahan oleh developer, selanjutnya dijual kepada pembeli (Nasoetion 1999b).

Pengembangan AGROSAWIT menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan, berupa perkembangan teknologi yang semakin pesat di negara pesaing, keterbatasan modal, keamanan berusaha, kepastian hukum, berkembangnya produk substitusi, serta masih terdapatnya kebijakan yang belum dapat menciptakan iklim **usaha** yang mendorong pengembangan AGROSAWIT.

Dari segi kebijakan, AGROSAWIT masih menghadapi kendala seperti belum terakomodirnya secara optimum kepentingan pihak-pihak terkait serta masih kurang antisipatif terhadap persaingan global. Permasalahan tersebut terjadi karena belum tertatanya secara baik fungsi dan peran lembaga penentu kebijakan, masih dominannya pendekatan sektoral dan penyeragaman kebijakan untuk seluruh wilayah. Sebagai perbandingan, Malaysia memiliki satu lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan agroindustri unggulan, terutama kelapa sawit, yaitu Kantor Menteri Industri Primer (*Ministry of Primary Industry*). Khusus untuk pengembangan AGROSAWIT, lembaga tersebut didukung oleh sembilan lembaga fungsional, diantaranya *Palm Oil Research Institute of Malaysia (PORIM)*, sehingga kebijakan pengembangan sawit dapat dilakukan dengan konsisten, terintegrasi, dan dinamis terhadap perubahan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengembangan AGROSAWIT Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, **dinamis**, dan bersifat probabilistik. Kondisi demikian memerlukan pendekatan sistem untuk menyelesaikannya sehingga setiap kebijakan bersifat *cybernetic*, *holistic*, dan *effective* (Eriyatno, 1998). Untuk itu dibutuhkan adanya kebijakan dan strategi yang dirancang berdasarkan pendekatan sistem.

Sebagai suatu sistem agroindustri maka sistem AGROSAWIT terdiri dari 4 (**empat**) subsistem, yaitu : (1) subsistem rantai produksi, (2) subsistem kebijakan, (3) subsistem kelembagaan, dan (4) subsistem distribusi dan pemasaran (Austin,

1992). Karena itu dalam mengkaji AGROSAWIT seluruh faktor-faktor eksternal, pihak-pihak berkepentingan, dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah **harus** dikaji secara mendalam agar benar-benar dapat dihasilkan kebijakan dan stategi yang efektif.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan secara hirarki serta prioritas antara faktor, aktor, tujuan, dan kebijakan pengembangan AGROSAWIT yang selanjutnya digunakan untuk menyusun strategi pengembangan AGROSAWIT yang menyerasikan kepentingan daerah, tenaga kerja, petani, pelaku usaha, dan pemerintah pusat.

METODOLOGI

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan metodologi *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada awal tahun 1970. Diawali dari **analisis** permasalahan pengembangan AGROSAWIT secara terstruktur, dilanjutkan dengan **analisis** pendapat pakar (*judgement*). Penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap analisis. Tahap pertama, berupa **analisis** sistem. Tahap kedua, ditujukan untuk mendapatkan faktor, aktor, tujuan dan alternatif kebijakan yang dominan terhadap pengembangan AGROSAWIT. Tahap ketiga, berupa pengumpulan data bobot pengaruh masing-masing alternatif kebijakan terhadap masing-masing tujuan, bobot pengaruh masing-masing tujuan terhadap masing-masing aktor, dan bobot masing-masing aktor terhadap masing-masing faktor.

Perumusan strategi didasarkan pada **hasil** analisis peringkat bobot instrumen kebijakan, tujuan, aktor, dan faktor.

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan **melalui** observasi, wawancara, dan studi **pustaka**. Observasi dilakukan di Sumatera Utara dan Riau, dan Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan di Jakarta, Sumatera Utara, dan Riau.

Pengambilan contoh dilakukan dengan teknik pengambilan contoh secara **sengaja** (*purposive sampling*) dengan kriteria mewakili setiap bidang keahlian dan diprioritaskan kepada pakar yang memiliki tingkat kepakaran yang telah diakui. Jumlah pakar yang disyaratkan untuk menggunakan teknik AHP cukup beberapa orang (Saaty, 1992). Berdasarkan hal tersebut maka

jumlah pakar dalam penelitian ini adalah sebanyak 46 orang pakar.

Data diolah dengan menggunakan teknik analisis penentuan tingkat bobot AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut : (a) analisis sistem, (2) dekomposisi, (3) comparative judgement, (4) synthesis of *priority*, dan (e) logical *consistency*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancang Bangun Sistem

Identifikasi sistem merupakan suatu rantai hubungan antara pernyataan kebutuhan dan pernyataan khusus dari masalah yang dipecahkan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Menurut Eriyatno (1998), hal ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebab akibat dan diagram Input Output.

Sistem AGROSAWIT Indonesia terdiri dari 2 (dua) subsistem utama, yaitu subsistem perkebunan dan subsistem pabrik kelapa sawit (PKS). Sementara subsistem industri hilir belum berkembang dengan baik. Subsistem perkebunan menghasilkan tandan buah segar (TBS) dan subsistem PKS mengolah TBS menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK). Berdasarkan batasan Sistem AGROSAWIT tersebut, maka industri penyedia sarana produksi pertanian, industri pengguna CPO dan PK, masyarakat luas, pemerintah pusat dan daerah, serta faktor makro dalam dan luar negeri dipandang sebagai lingkungan eksternal yang mempengaruhi Sistem AGROSAWIT.

Terdapat 3 (tiga) tujuan utama pengembangan AGROSAWIT, yaitu : (1) peningkatan kesejahteraan petani, (2) peningkatan keuntungan pelaku usaha, dan (3) peningkatan pendapatan pemerintah. Untuk mencapai tujuan sistem AGROSAWIT, subsistem perkebunan saling berinteraksi dengan subsistem pabrik PKS. Interaksi utama kedua subsistem tersebut adalah bahwa hasil perkebunan berupa TBS menjadi masukan bahan baku bagi pabrik PKS. Perkebunan menjual TBS dengan jumlah dan harga yang didasarkan atas pertimbangan harga input antara lain berupa pupuk dan upah/gaji tenaga kerja, sedangkan pabrik PKS membeli TBS atas dasar pertimbangan harga jual CPO dan PK sebagai pertimbangan utama. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh perkebunan dan pabrik PKS tersebut merupakan input bagi masing-masing subsistem, yang dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lingkungan.

Input subsistem perkebunan terutama dipengaruhi oleh industri penyedia sarana produksi pertanian, sedangkan input pabrik PKS terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar atau industri

pengguna CPO dan PK baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, perkebunan maupun pabrik PKS sama-sama dipengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung oleh perbankan/kreditor, pemerintah, masyarakat sekitar lokasi usaha, konsumen produk olahan sawit, komoditas substitusi, serta kondisi lingkungan makro ekonomi, moneter, politik, dan sosial/budaya.

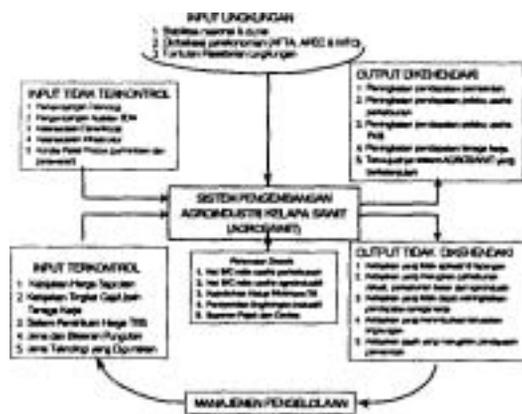
Diagram lingkaran sebab akibat Sistem AGROSAWIT dapat dilihat pada Gambar 1, menunjukkan hubungan antar objek di dalam maupun di luar sistem AGROSAWIT yang dilihat dari segi dampak positif atau negatif satu objek terhadap objek-objek lainnya. Pengembangan AGROSAWIT akan meningkatkan ekspor dan pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan perolehan devisa dan pendapatan pemerintah. Peningkatan pendapatan pemerintah juga didorong oleh terjadinya pengembangan wilayah sebagai dampak dari perkembangan perkebunan. Namun peningkatan perkebunan yang menggunakan lahan akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Pendapatan tenaga kerja didorong oleh peningkatan daya tampung tenaga kerja yang disebabkan oleh peningkatan investasi AGROSAWIT. Peningkatan investasi didorong oleh meningkatnya devisa dan tabungan masyarakat.



Gambar 1. Diagram Lingkaran Sebab Akibat (Casual Loop) AGROSAWIT

Gambar 2 menunjukkan hasil analisis diagram Input-Output sistem AGROSAWIT. Terdapat 5 (lima) output yang dikehendaki dalam pengembangan AGROSAWIT, yaitu : (1) peningkatan pendapatan pemerintah, (2) peningkatan pendapatan usaha perkebunan, (3) peningkatan pendapatan usaha PKS, (4) peningkatan pendapatan tenaga kerja, dan (5) terwujudnya sistem AGROSAWIT yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan output tersebut, input yang dapat dikendalikan oleh pemerintah dalam bentuk

kebijakan adalah (1) kebijakan harga saprotan, (2) kebijakan tingkat gaji/upah tenaga kerja, (3) sistem penentuan harga TBS, (4) jenis dan besaran pungutan (pajak dan retribusi), dan (5) jenis teknologi yang akan digunakan. Selain itu juga dipengaruhi oleh input tidak terkontrol, seperti kondisi pasca produk serta input lingkungan, seperti globalisasi ekonomi. Secara lengkap diagram input-output sistem AGROSAWIT terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Input-Output Sistem AGROSAWIT

Identifikasi Faktor, Aktor, Tujuan, dan Instrumen Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis sistem, studi literatur dan wawancara dengan pakar, dalam pengembangan AGROSAWIT terdapat 5 (lima) tingkat (level) hirarki, yaitu : (1) fokus pengembangan, (2) faktor yang mempengaruhi, (3) aktor yang terlibat, (4) tujuan yang hendak dicapai, dan (5) instrumen kebijakan yang dibutuhkan. Masing-masing level tersebut memiliki elemen-elemen seperti terlihat pada Tabel 1.

Analisis Bobot dan **Ranking**

Faktor

Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa faktor ketersediaan modal/dana dan faktor kondisi pasar merupakan faktor yang memiliki bobot tertinggi dibandingkan empat faktor lainnya yaitu ketersediaan infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi (Gambar 3). Faktor ketersediaan dana/modal menjadi penting

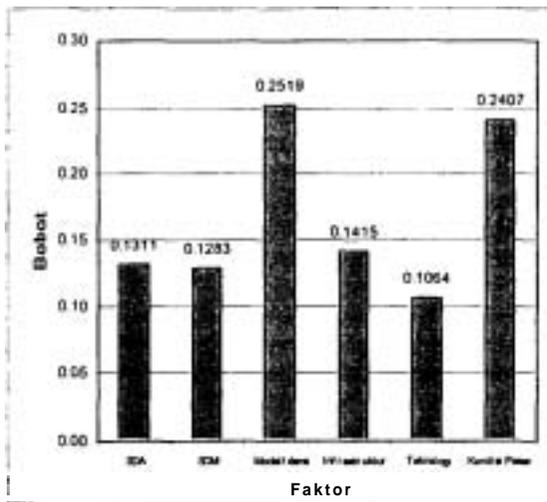
karena untuk membangun satu unit AGROSAWIT (6.000 ha kebun dan pabrik PKS dengan kapasitas 30 ton TBS/jam) sesuai kondisi tahun 2000 dibutuhkan investasi sekitar Rp. 100 – Rp. 120 milyar, tergantung dari lokasi kebun (Said Didu, 2000). Faktor kondisi pasar yang dominan dalam analisis AHP di atas karena CPO dan PK merupakan sumber utama minyak nabati, khususnya di Indonesia hampir sekitar 80 persen minyak goreng berasal dari bahan baku CPO. Di pasar dunia, minyak sawit menguasai 20 persen pangsa pasar minyak nabati yang menunjukkan bahwa terdapat persaingan yang ketat dengan produk substitusi terutama minyak kedelai (Oil World, 1998).

Tabel 1. Elemen Masing-masing Level Pengembangan AGROSAWIT

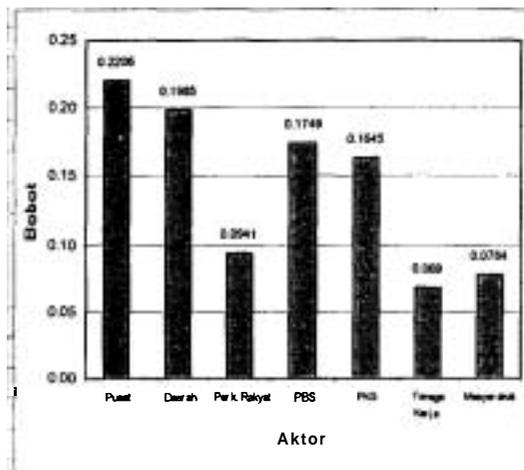
| Level | Elemen |
|------------------------|--|
| I. Fokus | Kebijakan Pengembangan AGROSAWIT |
| 2. Faktor | Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Modal/Dana, Infrastruktur, Teknologi, dan Kondisi Pasar |
| 3. Aktor | Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perkebunan Rakyat, Pabrik Kelapa Sawit, Tenaga Kerja, dan Masyarakat Setempat. |
| 4. Tujuan | Pendapatan Pemerintah, Pendapatan Usaha Perkebunan, Pendapatan PKS, Pendapatan Tenaga Kerja, dan Kualitas Lingkungan |
| 5. Instrumen Kebijakan | Harga Saprotan (pupuk), Gaji/Upah Tenaga Kerja, Harga TBS, Pajak, Teknologi Pengolahan, dan Penanganan Limbah. |

Aktor

Pada jenjang aktor, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih dominan pengaruhnya terhadap penetapan kebijakan yang menentukan keberhasilan pengembangan AGROSAWIT, sedangkan Rakyat Pekebun, Tenaga Kerja dan Masyarakat Sekitar lokasi usaha perannya masih dianggap rendah (Gambar 4).



Gambar 3. Bobot Faktor Sistem AGROSAWIT



Gambar 4. Bobot Aktor Sistem AGROSAWIT

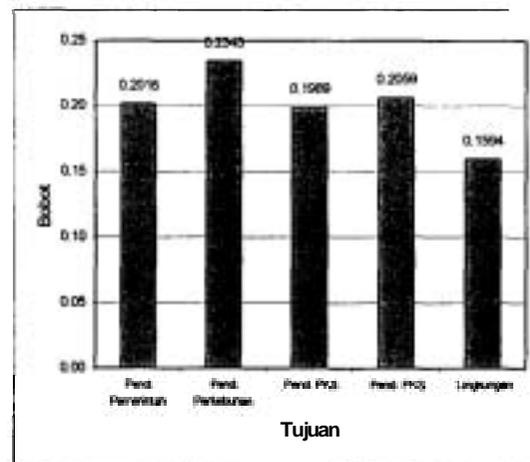
Peran pemerintah yang masih dominan dalam pengembangan AGROSAWIT disebabkan faktor-faktor mempengaruhi AGROSAWIT (infrastruktur, sumber daya alam, pasar, sumber daya manusia, dan ketersediaan modal) sebagian besar dalam penguasaan atau minimal sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Tingginya peran pemerintah juga disebabkan oleh banyaknya lembaga pemerintah yang kebijakannya terkait dengan pengembangan AGRISAWIT. Berdasarkan analisis terhadap Kabinet Persatuan Nasional, terdapat 26 lembaga di tingkat pusat dan 17 lembaga di daerah yang kebijakannya terkait dengan pengembangan AGROSAWIT di Indonesia (Said Didu, 2000a).

Perubahan politik dalam negeri yang cenderung semakin desentralistik akan menjadi

tantangan baru dalam penetapan kebijakan AGROSAWIT. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom menunjukkan semakin tingginya peran pemerintah daerah dalam pembangunan, termasuk pengembangan agro-industri. Dengan demikian, maka kebijakan pengembangan AGROSAWIT harus semakin memperhatikan kondisi dan keinginan daerah setempat termasuk faktor sosial dan budaya. Kebijakan demikian bertujuan agar setiap program lebih bersifat *local specific*, partisipatif, transparan, serta lebih mengutamakan akumulasi dan kekayaan dimensi sosial sebagai basis agar terwujud pemberdayaan ekonomi rakyat yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi (Nasoetion, 1999a). Langkah tersebut akan meningkatkan peran aktor lain dalam mendorong pengembangan AGROSAWIT.

Tujuan

Analisis AHP terhadap tujuan pengembangan AGROSAWIT menunjukkan bahwa tujuan yang hendaknya menjadi prioritas adalah peningkatan pendapatan pekebun dan pendapatan tenaga kerja (Gambar 5). Tujuan untuk peningkatan pendapatan perkebunan dan tenaga kerja sebagai prioritas dalam AGROSAWIT



Gambar 5. Bobot Tujuan Pengembangan Sistem AGROSAWIT

hendaknya dijadikan faktor utama setiap perumusan strategi dan kebijakan AGROSAWIT. Perkebunan wajar menerima tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari PKS karena resiko usaha perkebunan lebih besar dari PKS karena produksinya tergantung

oleh kondisi alam seperti hama dan penyakit tanaman dan TBS yang dihasilkan hanya dapat disimpan selama 24 jam. Sementara tenaga kerja diprioritaskan karena hingga saat ini gajilupah yang diterima sebesar Upah Minimum Regional (UMR) masih belum mencukupi untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

Pengembangan AGROSAWIT di Indonesia melibatkan rakyat dalam jumlah besar. Dari luasan kebun sekitar 3 juta ha menampung tenaga kerja langsung sekitar 1,8 juta. Dengan demikian, maka pemberdayaan tenaga kerja pekebunan sawit akan mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Strategi yang dapat ditempuh adalah : (1) menciptakan suasana agar potensi masyarakat berkembang (enabling), (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), dan (3) melindungi masyarakat (Kartasmita, 1996). Pemberdayaan masyarakat kebun dapat diukur dari kemampuan ekonomi dan kemandirian dalam pengelolaan usaha tani mereka. Kemampuan ekonomi petani ditentukan oleh harga jual produk, biaya produksi (terutama saprotan), dan ketersediaan dana. Harga jual produk pertanian selain dipengaruhi oleh biaya produksi dan sifat produk yang dihasilkan, juga ditentukan oleh posisi tawar produsen yaitu rakyat pekebun (Ferris, 1998).

Kebijakan

Pada tahap akhir analisis AHP, diperoleh hasil tentang strategi yang dibutuhkan untuk pengembangan AGROSAWIT adalah penetapan harga TBS, gajilupah dan perpajakan yang menunjukkan prioritas yang tinggi (Gambar 6).

Kebijakan penetapan harga TBS menjadi sangat penting karena penetapan harga beli pabrik terhadap TBS hasil petani saat ini masih berprinsip pada sistem "titip olah jual" sesuai dengan Keputusan Pemerintah. Terakhir dengan Keputusan Menhutubun No No. 627/Kpts-11/1998, tanggal 11 September 1998 dengan formula sebagai berikut :

$$H_{TBS} = K \{ (H_{CPO} \times R_{CPO}) + (H_{PK} \times R_{PK}) \}$$

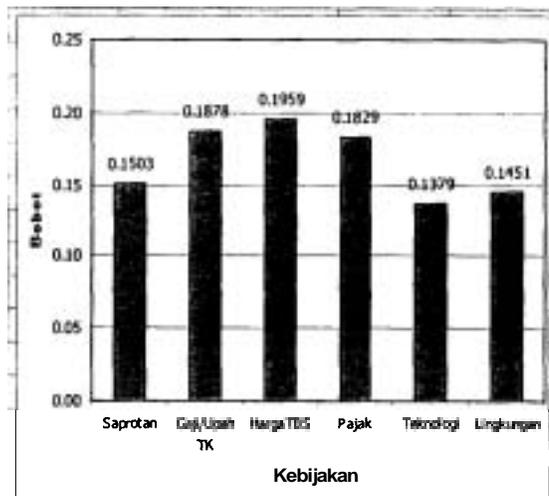
dimana,

H_{TBS} : harga TBS di petani, Rp/Kg
 K : proporsi bagian yang diterima petani
 H_{CPO} : harga CPO, Rp/kg;
 R_{CPO} : Rendemen CPO, %
 H_{PK} : harga inti sawit, Rp/kg;
 R_{PK} : rendemen inti sawit, %

Dalam penerapannya, harga TBS yang diterima petani dikurangi dengan margin yang diterima oleh PKS yang umumnya berkisar 5 persen. Penentuan harga TBS berdasarkan persamaan tersebut mengandung berbagai kelemahan yang merugikan petani, yaitu : (1) PKS mendapatkan keuntungan yang pasti, sementara petani akan

menanggung berbagai resiko; (2) terdapat berbagai komponen biaya yang tidak dapat dikontrol oleh pemilik TBS (petani), sementara biaya tersebut harus ditanggung oleh petani; (3) penentuan rendemen pabrik dalam penentuan nilai K sulit diketahui oleh petani; dan (4) penentuan nilai K (proporsi yang diterima petani) oleh suatu Tim di daerah yang didasarkan pada rendemen riil pabrik kenyataannya harga TBS yang berlaku masih lebih rendah dari yang seharusnya diterima oleh petani.

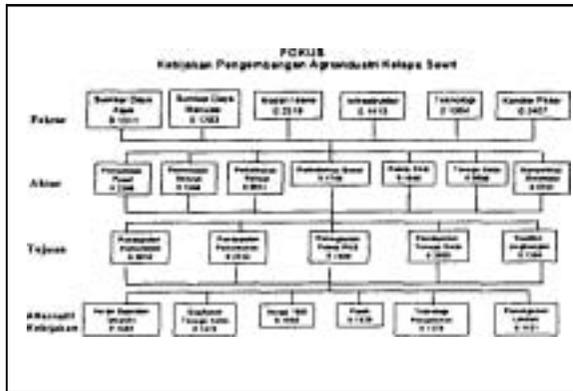
Dengan sistem tersebut maka dinamika perubahan biaya produksi kebun belum dapat diakomodir, sementara seluruh kepentingan pabrik dapat diakomodir.



Gambar 6. Bobot Instrumen Kebijakan Sistem AGROSAWIT

Hasil analisis AHP (Gambar 7) menunjukkan bahwa strategi pengembangan AGROSAWIT adalah mengupayakan penyediaan modal dana, memperbaiki kondisi pasar, menata peran pemerintah, dan mengupayakan peningkatan pendapatan pelaku perkebunan. Pelaksanaan strategi tersebut hendaknya didukung oleh kebijakan penetapan harga TBS, gajilupah tenaga kerja, dan kebijakan perpajakan.

Sebagai suatu sistem agroindustri, rancangan kelembagaan/organisasi tersebut hendaknya mempertimbangkan seluruh komponen sistem yang juga disesuaikan dengan perubahan paradigma pembangunan yang makin terdesentralisasi, mengutamakan prakarsa masyarakat serta pengaruhnya terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup (Said Didu, 2000b).



Gambar 7. Hasil Analisis AHP Sistem AGROSAWIT

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembangan AGROSAWIT melalui pendekatan sistem sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan subsistem perkebunan dan subsistem PKS. Namun secara bertahap hendaknya semakin diintegrasikan dengan pengembangan subsistem kelembagaan dan subsistem pemasaran.

Strategi pengembangan AGROSAWIT hendaknya dirancang berdasarkan analisis faktor, aktor, tujuan, serta instrumen kebijakan yang dominan.

Rancangan strategi pengembangan AGROSAWIT hendaknya mengutamakan faktor ketersediaan modal/dana serta terus mengantisipasi dan memperbaiki kondisi pasar. Peran Pemerintah (terutama pemerintah daerah) masih sangat diharapkan dalam menciptakan kebijakan yang kondusif. Tujuan yang seharusnya mendapatkan prioritas adalah peningkatan pendapatan perkebunan dan peningkatan pendapatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan strategi tersebut kebijakan pokok yang menentukan adalah pengaturan dalam hal harga TBS, gaji dan upah dan penataan sistem perpajakan (termasuk retribusi).

Saran

Untuk mempertajam strategi pengembangan AGROSAWIT di suatu wilayah diperlukan penelitian yang didasarkan pada satu kesatuan wilayah yang memiliki faktor, aktor, dan tujuan yang relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus. 2000. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerbit Restu, Jakarta.

Anonimus. 1998. Oil World 1998.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 1999. Statistik Perkebunan Indonesia 1997-1999. Dephutbun, Jakarta.

Eriyatno. 1998. Ilmu Sistem (ed. 2). IPB Press, Bogor.

Ferris, J. N. 1998. Agricultural Prices and Commodity Market Analysis. McGraw-Hill Co., Boston.

Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES, Jakarta.

Killick, T. 1981. Di dalam Ellis F. 1994. Agricultural Policies in Developing Countries. Cambridge University Press, Melbourne, Australia.

Nasoetion, M. 1999a. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Penujuran Demokrasi Ekonomi : Implemetasi dalam Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.

_____. 1999b. Pengembangan Agroindustri Berbasis SDM dan IPTEK. Di dalam Sudradjat, A (ed.). 1999. Mewujudkan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.

Needham, D. 1982. The Economics and Politics of Regulation : A Behavioral Approach. Little, Brown and Company, Boston.

Saaty, T.L. 1992. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin. Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks. Terjemahan. PT. Pustaka Binana Pressindo. Jakarta.

Said Didu, 2000a. Rancang Bangun Sistem Pengembangan Agroindustri Kelapa Sawit untuk Perekonomian Daerah. Disertasi Doktor (tidak diterbitkan).

_____, 2000b. Merancang Kelembagaan Agroindustri. Jurnal Teknologi Industri Pertanian Vol 9 (3), 140 - 144.

Pamin, K dan L. Buana. 1999. Development and the Oil Palm Industry in Indonesia. Proceedings PORIM International Palm Oil Congress. 1-6 February 1999. Kuala Lumpur. Malaysia.

Tondok, A. R. 1998. Production and Marketing of The Indonesian Palm Oil : Past, Present, and The Future. Di dalam Proceedings 1998 International Oil Palm Conference, Commodity of the Past, Today, and the Future. Indonesian Oil Palm Research Institut. Medan, Indonesia.